



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUNAIDY
2. Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 441106

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 975.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 480 m2/220 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. Tanah Seluas 1350 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. Tanah Seluas 60 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HILIR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. Tanah Seluas 11340 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN MERANTI, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 96.500.000

1. MOTOR, TVS SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
4. MOTOR, HONDA X1H02N32L1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 28.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 147.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.453.928
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.227.953.928
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.227.953.928

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.